

Islamic Economics and Sustainable Development Goals in Jeneponto Regency

Juardi¹, Aulia Rahman B², Baso Iwang³, Isra Nurul Utama⁴,
Ahmad Kafrawi Mahmud⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

e-mail: juardi.juardi@uin-alauddin.ac.id¹, aulia.rahman@uin-alauddin.ac.id²,
baso.iwang@uin-alauddin.ac.id³, uisranurul@gmail.com⁴,
ahmad.kafrawi@uin-alauddin.ac.id⁵

Received: 16 November 2022; Revised: 22 Desember 2022; Published: 23 Desember 2022

Abstrak

Tujuan penelitian ini menganalisis ketercapaian *sustainable development goals* (SDGs) di Kabupaten Jeneponto sebagai bagian dari parameter kemajuan peradaban Islam. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan analisis jalur (*path analysis*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, namun memiliki pengaruh positif terhadap pengangguran. Sementara DAU memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, akan tetapi berpengaruh negatif terhadap pengangguran. Variabel DAK berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengangguran, baik secara langsung maupun melalui pertumbuhan ekonomi. Implikasi dari temuan penelitian ini bahwa perumusan kebijakan dan strategi pembangunan belum begitu maksimal di daerah ini sehingga berdampak pada capaian SDGs yang masih rendah. Pelaksanaan SDGs di Kabupaten Jeneponto telah keluar dari jalur nilai-nilai keislaman, sebagaimana dalam islam dijelaskan bahwa pembangunan ekonomi bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat yang disebut konsep *Falah*. Tanpa keadilan dan adil terhadap manusia dan alam, *Falah* tidak akan pernah tercapai, khususnya dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Kata Kunci: Ekonomi Islam, *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Abstract

The purpose of this study is to analyze the achievement of sustainable development goals (SDGs) in Jeneponto Regency as part of the parameters of the progress of Islamic civilization. This research is a quantitative research using path analysis (path analysis). The research results show that PAD has a negative effect on economic growth, but a positive effect on unemployment. While DAU has a positive effect on economic growth, it has a negative effect on unemployment. The DAK variable has a negative effect on economic growth and unemployment, both directly and through economic growth. The implication of the findings of this research is that the formulation of development policies and strategies has not been maximized in this area, so the impact on the achievement of the SDGs is still low. The implementation of the SDGs in Jeneponto Regency has deviated from the path of Islamic values, as in Islam it is explained that economic development aims to achieve people's welfare and prosperity which is called the Falah concept. Without justice and fairness to humans and nature, Falah will never be achieved, especially in creating inclusive economic growth.

Keywords: Islamic Economics, *Sustainable Development Goals* (SDGs)

PENDAHULUAN

Pada masa lalu, peradaban Islam tercatat sebagai salah satu peradaban yang sangat maju. Kejayaan ini bahkan menjadi pijakan peradaban manusia dalam pengembangan dan kemajuan khasanah ilmu pengetahuan yang mengungguli, bahkan mempengaruhi peradaban manusia saat itu. Salah satu contoh yang paling realistik adalah perkembangan ekonomi yang bergeser ke sistem digital dan umat Islam dianggap gagap menemukan landasan perilaku ekonomi digital yang adaptif terhadap perubahan zaman. Umat muslim seolah gagal menemukan solusi sebagai pengarah masyarakat ke arah yang lebih maju, (Abdurrahman et al, 2022).

Akibat tidak adanya legitimasi yang bisa dijadikan sebagai rujukan umat Islam dalam perilaku ekonomi digital saat ini, akhirnya banyak sistem ekonomi yang berjalan dan berkembang dinyatakan sebagai hal yang tidak sesuai syariat, ditinggalkan dan kemudian dikuasi oleh barat, (Abdurrahman et al, 2022b). Di sisi lain, para pemimpin dunia telah berhasil merancang sebuah sistem kemajuan peradaban manusia yang lebih mapan dan mencakup segala aspek kehidupan melalui rumusan dalam *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Konsep ini merupakan pengembangan dari rumusan *Millenium Development Goals (MDGs)* yang diarahkan pada ketercapaian pembangunan ekonomi suatu negara/wilayah.

Konteks ekonomi makro, pembangunan yang diartikan sebagai suatu proses terjadinya peningkatan pada pendapatan riil perkapita penduduk dalam jangka panjang dan disertai dengan perbaikan menuju arah yang lebih baik pada sistem kelembagaan. Idealnya, pembangunan yang terjadi sebisa mungkin memberikan dampak perubahan yang lebih baik dan bersifat berkelanjutan (Bato & Khatimah, 2021); (Zainur, 2021). SDGs yang berlaku sejak tahun 2015 hingga tahun 2030 mendatang merupakan kesepakatan global tentang pembangunan yang mengarah pada pembangunan berkelanjutan untuk menciptakan pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan hidup yang dilaksanakan berdasarkan prinsip kesetaraan dengan tetap memerhatikan hak asasi manusia, (Supriyanto, dkk, 2017). SDGs diharapkan mampu menyelesaikan agenda pembangunan yang masih banyak menimbulkan persoalan dan belum sepenuhnya mengangkat derajat umat muslim di dunia, (Arianto & Wirasenjaya, 2019).

Secara empiris, telah terbukti bahwa kehadiran pemerintah sangat diperlukan dalam mengatur aktivitas ekonomi masyarakat. Peran pemerintah sangat penting dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (Jannah &

Bawono, 2021); (Mubin, 2021); (Caballero, 2019). Upaya pencapaian SDGs membutuhkan sinergi dalam kebijakan perencanaan mulai dari tingkat nasional hingga tingkat daerah kabupaten atau kota (Patiung, 2019). Daerah harus memiliki rasa kepemilikan dan turut berperan dalam melaksanakan SDGs karena daerah menjadi ujung tombak dari kesuksesan pelaksanaan agenda pembangunan global (Jannah & Bawono, 2021); (Sofianto, 2019); (Smith et al., 2018); (Mafrudlo, 2022).

Pelaksanaan SDGs bidang ekonomi di Kabupaten Jeneponto masih ditemui berbagai kendala dan keluar dari jalur nilai-nilai keislaman, sebagaimana dalam islam dijelaskan bahwa pembangunan ekonomi bertujuan untuk mencapai suatu kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat yang biasa disebut konsep *Falah*. Tanpa Keadilan dan adil terhadap manusia dan alam, *Falah* tidak akan pernah dapat tercapai, khususnya dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Artinya bahwa, meskipun tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi di wilayah ini, akan tetapi tidak memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Padahal pertumbuhan ekonomi dan pengangguran dianggap sebagai variabel yang sangat dominan dalam perumusan dan penerapan kebijakan ekonomi (Shaaibith et al., 2020).

Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jeneponto mengalami fluktuasi namun didominasi dengan terjadinya penurunan. Tahun 2016 merupakan tahun yang menjadi acuan (*starting point*) untuk melihat kemajuan pelaksanaan program SDGs yang mulai berjalan pada tahun 2015. Berdasarkan tahun acuan tersebut, sejak tahun 2016-2020 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jeneponto mengalami penurunan secara konsisten dari tahun ke tahun. Tahun 2020 menjadi tahun dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang terendah mencapai angka 0,16. Sehingga, membuktikan terdapat masalah dalam pelaksanaan pembangunan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebagai bentuk dari pelaksanaan SDGs bidang ekonomi di Kabupaten Jeneponto.

Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, pada dasarnya Kabupaten Jeneponto membutuhkan dana sebagai modal dalam melaksanakan pembangunan agar dapat berjalan dengan maksimal. Dana yang digunakan dapat berasal dari berbagai sumber seperti dari pemerintah pusat yaitu dana alokasi umum dan dana alokasi khusus hingga yang bersumber dari daerah sendiri yaitu pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah pada dasarnya diperoleh berdasarkan hasil pemungutan sesuai dengan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan (Firdausy, 2017: 20). Pendapatan asli daerah dapat menjadi modal yang menunjang pelaksanaan pembangunan daerah (Rizal et al., 2021). Dana perimbangan yang disalurkan oleh pemerintah pusat seperti

dana alokasi umum dan dana alokasi khusus dapat menjadi alternatif sumber penerimaan daerah yang mampu mendukung pembiayaan daerah dalam melaksanakan pembangunan (Firdausy, 2017: 9).

Berdasarkan penelitian yang telah ada bahwa penggunaan indeks pembangunan manusia sebagai indikator pencapaian *SDGs* bidang ekonomi (Jannah & Bawono, 2021) maka, penelitian ini menggunakan indikator lain yang berbeda dari penelitian sebelumnya.

Penggunaan dua indikator dalam mengukur pencapaian *SDGs* bidang ekonomi masih jarang ditemukan. Sehingga, penelitian ini menggunakan dua indikator yang menjadi ukuran pencapaian *SDGs* bidang ekonomi yaitu pertumbuhan ekonomi dan pengangguran. Kedua indikator tersebut merupakan indikator dari tujuan kedelapan *SDGs*. Sesuai dengan Teori Pertumbuhan Neo-Klasik Solow-Swan bahwa modal merupakan salah satu faktor produksi yang dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi sehingga penelitian ini menjadikan pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus sebagai variabel independen. Penelitian ini menyelidiki pengaruh langsung dari masing-masing pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengangguran. Selanjutnya, diselidiki pula pengaruh tidak langsung dari pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap pengangguran melalui pertumbuhan ekonomi yang berperan sebagai variabel intervening dalam penelitian ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa runtun waktu (*time series*). Pengumpulan data menggunakan Teknik Dokumentasi. Data bersumber dari publikasi lembaga pemerintahan Badan Pusat Statistik Kabupaten Jeneponto dan Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Data yang dikumpulkan ialah data variabel independen yaitu pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Data variabel intervening yaitu pertumbuhan ekonomi serta data variabel dependen yaitu tingkat pengangguran terbuka.

Alat analisis yang digunakan ialah teknik analisis jalur (*path analysis*) dengan menggunakan aplikasi SPSS 21. Variabel penelitian dibentuk kedalam model persamaan statistik sebagai berikut:

$$Y_1 = \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon_1 \dots \dots \dots (1)$$

$$Y_2 = \beta_4 X_1 + \beta_5 X_2 + \beta_6 X_3 + \beta_7 Y_1 + \varepsilon_2 \dots \dots \dots (2)$$

Persamaan (1) dan (2) tidak linear sehingga perlu dilakukan transformasi terhadap persamaan tersebut menjadi model semilog (Ln) sehingga menghasilkan persamaan yang linear seperti berikut ini.

$$Y_3 = \beta_1 \text{Ln } X_1 + \beta_2 \text{Ln } X_2 + \beta_3 \text{Ln } X_3 + \varepsilon_1 \dots \dots \dots (3)$$

$$Y_4 = \beta_4 \text{Ln } X_1 + \beta_5 \text{Ln } X_2 + \beta_6 \text{Ln } X_3 + \beta_7 \text{Ln } Y_1 + \varepsilon_2 \dots \dots \dots (4)$$

Dimana, Y_1 adalah pertumbuhan ekonomi (persen), Y_2 adalah Pengangguran (persen), X_1 adalah Pendapatan Asli Daerah (rupiah), X_2 adalah Dana Alokasi Umum (rupiah), X_3 adalah Dana Alokasi Khusus (rupiah), Ln adalah Logaritma natural, $\beta_1 \beta_2 \beta_3 \beta_4 \beta_5 \beta_6 \beta_7$ adalah Koefisien regresi dari tiap-tiap variabel X dan $\varepsilon_1 \varepsilon_2$ adalah *standar error*.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Model Persamaan Pertama

Hasil uji koefisien determinasi pada variabel dependen pertumbuhan ekonomi menunjukkan nilai koefisien determinasi atau R square sebesar 0,182 atau sama dengan 18,2 persen. Sehingga, seluruh variabel independen mampu menjelaskan variabel pertumbuhan ekonomi sebesar 18,2 persen. Selebihnya yaitu 81,8 persen dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

Hasil Uji Statistik F menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,683 > 0,05$. Sehingga, semua variabel independen secara simultan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan hasil pengujian statistik t, diperoleh hasil regresi seperti berikut ini.

$$Y_1 = -0,691 X_1 + 0,417 X_2 - 0,083 X_3 + 0,904 + \varepsilon_1$$

Model Persamaan Kedua

Hasil uji koefisien determinasi pada variabel dependen pengangguran menunjukkan nilai koefisien determinasi atau R square sebesar 0,885 atau sama dengan 88,5 persen. Sehingga, semua variabel bebas mampu menjelaskan variabel pengangguran sebesar 88,5 persen. Selebihnya yaitu 11,5 persen dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

Hasil uji statistik F menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,006 < 0,05$. Sehingga, semua variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap pengangguran. Berdasarkan hasil uji statistik t, diperoleh hasil regresi dengan persamaan seperti berikut ini.

$$Y_2 = 0,576 X_1 - 1,347 X_2 - 0,022 X_3 + 0,197 Y_1 + 0,339 + \varepsilon_2$$

Hubungan antar variabel, baik pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung, maupun pengaruh total diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 1. Pengaruh Langsung, Pengaruh Tidak Langsung dan Pengaruh Total Variabel Penelitian

Hubungan antar Variabel	Pengaruh			
	Sig	Langsung	Tidak Langsung	Total
$X_1 \rightarrow Y_1$	0,422	-0,691	-	-0,691
$X_2 \rightarrow Y_1$	0,619	0,417	-	0,417
$X_3 \rightarrow Y_1$	0,899	-0,083	-	-0,083
$X_1 \rightarrow Y_2$	0,147	0,576	-0,136	0,440
$X_2 \rightarrow Y_2$	0,007	-1,347	0,082	-1,265
$X_3 \rightarrow Y_2$	0,934	-0,022	-0,016	-0,038
$Y_1 \rightarrow Y_2$	0,246	0,197	-	0,197

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS 21, Tahun 2022

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan pengujian pada data penelitian yang telah dilakukan memberikan hasil nilai koefisien sebesar -0,691 dan taraf signifikansi sebesar $0,422 > 0,05$. Sehingga, menghasilkan kesimpulan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Artinya, peningkatan yang terjadi pada pendapatan asli daerah tidak mampu membuat perekonomian di Kabupaten Jeneponto menjadi meningkat atau yang terjadi ialah justru membuat perekonomian menurun.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori pertumbuhan Neoklasik oleh Solow-Swan. Teori pertumbuhan Neoklasik oleh Solow-Swan menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat terjadi bergantung pada faktor-faktor produksi salah satunya ialah faktor produksi modal. Semakin baik faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh suatu daerah maka akan semakin memberikan hasil yang baik terhadap pertumbuhan ekonomi. Pendapatan asli daerah yang

merupakan modal dasar yang digunakan dalam melaksanakan pembangunan seharusnya mampu memberikan pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Jumlah pendapatan asli daerah yang semakin besar semestinya mampu membuat pertumbuhan ekonomi semakin meningkat karena modal yang dimiliki jumlahnya semakin banyak digunakan untuk melaksanakan pembangunan di Kabupaten Jeneponto namun yang terjadi ialah sebaliknya. Pendapatan asli daerah tidak mampu memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian di Kabupaten Jeneponto.

Ketidakmampuan pendapatan asli daerah dalam meningkatkan perekonomian di Kabupaten Jeneponto disebabkan oleh beberapa hal seperti rendahnya kontribusi pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jeneponto tahun 2020, kontribusi pendapatan asli daerah hanya Rp. 109.189.131.000 dari total keseluruhan pendapatan yang diperoleh yaitu Rp. 1.256.069.109.580 atau sama dengan 8,7 persen. Hal ini berarti dari total keseluruhan pendapatan daerah Kabupaten Jeneponto, Pendapatan asli daerah hanya memberikan kontribusi sebesar 8,7 persen dan 91,3 persen lainnya berasal dari sumber pendapatan diluar dari pendapatan asli daerah. Sehingga, perekonomian Kabupaten Jeneponto tidak mengalami peningkatan meskipun jumlah pendapatan asli daerah yang diperoleh mengalami peningkatan karena kenaikan pendapatan asli daerah belum memberikan kontribusi yang besar terhadap total keseluruhan pendapatan daerah. Disisi lain, secara tidak langsung telah menggambarkan bahwa Kabupaten Jeneponto belum mampu mengelola dengan baik potensi daerahnya karena capaian pendapatan asli daerah masih tergolong sangat kecil terhadap total pendapatan daerah secara keseluruhan.

Selain itu, dalam hal pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Kabupaten Jeneponto masih digunakan dalam pelaksanaan pembangunan yang kurang produktif sehingga belum mampu memberikan dampak positif terhadap peningkatan perekonomian daerah. Sebagaimana total realisasi belanja pada tahun 2020 yang tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jeneponto, dari total belanja daerah yang terealisasi yaitu Rp. 1.093.202.342.326 sebagian besar digunakan untuk pembiayaan kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak mampu memberikan dampak yang positif pada perekonomian daerah. Sebesar 48 persen dari total belanja daerah dialokasikan untuk belanja pegawai. Artinya, hampir setengah dari total alokasi belanja daerah Kabupaten Jeneponto digunakan untuk kegiatan yang tidak dapat meningkatkan perekonomian secara keseluruhan karena sebagian besar belanja daerah digunakan untuk belanja pegawai seperti pemberian gaji

terhadap pegawai negeri sipil daerah yang jumlahnya masih minim yaitu sebanyak 5.319 orang dari total tenaga kerja sebesar 183.928 orang atau sama dengan 2,8 persen dari keseluruhan tenaga kerja di Kabupaten Jeneponto tahun 2020.

Penggunaan belanja daerah yang hampir setengah dari total belanja daerah digunakan untuk alokasi belanja pegawai negeri sipil yang jumlahnya hanya berjumlah 2,8 persen dari keseluruhan tenaga kerja di Kabupaten Jeneponto tentu saja tidak dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan perekonomian daerah. Penggunaan belanja daerah sebesar 48 persen dialokasikan hanya untuk kesejahteraan 2,8 persen tenaga kerja di Kabupaten Jeneponto sedangkan terdapat 97,2 persen tenaga kerja lainnya dan sektor-sektor perekonomian lain yang lebih membutuhkan anggaran dalam jumlah yang besar untuk mendorong terciptanya investasi dan peningkatan ekspor daerah sehingga perekonomian menjadi meningkat.

Perekonomian daerah pada dasarnya dapat meningkat apabila proses pembangunan yang dilaksanakan dapat meningkatkan kemampuan daerah dalam memproduksi barang ataupun jasa. Peningkatan produksi tersebut dapat dilakukan pada berbagai sektor perekonomian seperti pertanian, perdagangan dan sektor-sektor perekonomian lainnya yang dapat meningkatkan pendapatan daerah. Walaupun pendapatan asli daerah di Kabupaten Jeneponto terus mengalami peningkatan namun hanya digunakan untuk kegiatan yang kurang produktif terhadap perekonomian daerah secara meluas maka pendapatan asli daerah yang diperoleh tidak akan meningkatkan perekonomian Kabupaten Jeneponto. Sehingga, diperlukan perbaikan pada penyusunan alokasi belanja daerah agar pendapatan yang diperoleh mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi.

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil pengujian data penelitian yang menunjukkan bahwa nilai koefisien sebesar 0,417 dengan taraf signifikansi sebesar $0,619 > 0,05$. Sehingga, dana alokasi umum memberikan pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini mengandung maksud bahwa ketika dana alokasi umum yang diperoleh jumlahnya meningkat maka peningkatan tersebut dapat berdampak pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi secara tidak signifikan di Kabupaten Jeneponto.

Dana alokasi umum adalah salah satu jenis dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten Jeneponto untuk membantu daerah dalam rangka melaksanakan desentralisasi. Membantu dalam hal pembiayaan pelaksanaan

pembangunan di daerah merupakan salah satu fungsinya. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan hubungan positif yang dimiliki oleh dana alokasi umum dan pertumbuhan ekonomi telah mengindikasikan bahwa penggunaan dana alokasi umum di Kabupaten Jeneponto sudah menunjukkan kinerja yang baik walaupun belum maksimal karena mampu meningkatkan perekonomian daerah secara tidak signifikan. Dalam hal ini, ketika jumlah dana alokasi umum yang diperoleh Kabupaten Jeneponto meningkat maka akan membuat perekonomian daerah menjadi meningkat secara tidak signifikan.

Kemampuan dana alokasi umum di Kabupaten Jeneponto dalam meningkatkan perekonomian daerah telah sejalan dengan teori pertumbuhan neoklasik oleh Solow-Swan yaitu modal sebagai salah satu faktor produksi dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi. Dana alokasi umum dapat menjadi modal yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan daerah. Berdasarkan kontribusi dana alokasi umum terhadap pendapatan daerah pada tahun 2020 yang tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jeneponto sangat besar dibandingkan dengan sumber-sumber pendapatan lainnya. Pada tahun 2020, total realisasi pendapatan daerah Kabupaten Jeneponto sebesar Rp. 1.256.069.109.580 dan dana alokasi umum yang diperoleh ialah Rp. 616.181.442.000. Artinya, 49 persen dari total pendapatan daerah Kabupaten Jeneponto bersumber dari dana alokasi umum. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa kontribusi dana alokasi umum terhadap pendapatan daerah Kabupaten Jeneponto sangat besar karena hampir setengah dari total pendapatan daerah berasal dari dana alokasi umum. Modal yang digunakan dalam membiayai pelaksanaan pembangunan menjadi meningkat karena besarnya kontribusi yang diberikan dana alokasi umum terhadap pendapatan daerah Kabupaten Jeneponto.

Kabupaten Jeneponto merupakan salah satu daerah yang pernah ditetapkan sebagai daerah 3T (Terdepan, Terpencil dan Tertinggal) pada tahun 2015 oleh Presiden Republik Indonesia sehingga dalam pelaksanaan pembangunan memerlukan modal yang lebih besar dari daerah lain. Besarnya perolehan dana alokasi umum telah mampu meningkatkan modal yang akan digunakan dalam membiayai seluruh program pembangunan di daerah Kabupaten Jeneponto. Peningkatan modal tersebut yang berasal dari dana alokasi umum telah mampu membuat perekonomian menjadi meningkat. Akan tetapi, peningkatan tersebut belum maksimal karena tidak mampu memberikan peningkatan yang signifikan terhadap perekonomian daerah.

Penggunaan dana alokasi umum yang belum mampu memberikan hasil yang maksimal terhadap peningkatan perekonomian daerah karena alokasi

belanja daerah kabupaten Jeneponto belum diprioritaskan pada pembiayaan pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan perekonomian daerah secara meluas. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jeneponto tahun 2020, penggunaan belanja daerah sebagian besar dialokasikan pada belanja operasi yaitu sebesar 77 persen dari total belanja daerah. Belanja operasi pada dasarnya digunakan sehari-hari oleh pemerintah daerah yang memberikan manfaat hanya bersifat jangka pendek. Jenis belanja yang termasuk belanja operasi ialah misalnya belanja pegawai, belanja bantuan sosial, belanja barang dan jasa. Kemudian, sebesar 61 persen dari total belanja operasi dialokasikan untuk belanja pegawai yang sifatnya tidak terlalu memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Sedangkan, 33 persen lainnya dari total belanja daerah digunakan untuk belanja modal yang pada dasarnya memberikan dampak jangka panjang bagi perekonomian daerah. Dari semua jenis belanja daerah, belanja modal merupakan jenis belanja yang paling mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan daerah. Hal ini dapat terjadi karena melalui pembelian barang berupa tanah, mesin, pembiayaan infrastruktur bangunan, jalan, irigasi dan lain-lain dapat menjadi modal dalam meningkatkan produksi yang menunjang perekonomian daerah. Kabupaten Jeneponto adalah daerah yang memiliki potensi di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan tercermin dari kontribusi sektor tersebut terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 44,23% sehingga dibutuhkan strategi yang tepat untuk dapat mempertahankan pertumbuhan pada sektor tersebut. Salah satunya ialah dengan mengalokasikan belanja daerah untuk pelaksanaan pembangunan yang dapat meningkatkan produktivitas sektor pertanian, kehutanan dan perikanan.

Berdasarkan laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jeneponto tahun 2020, secara tidak langsung menggambarkan bahwa alokasi belanja daerah masih diprioritaskan pada belanja operasi khususnya belanja pegawai dan hanya sebagian kecil dialokasikan untuk belanja yang sifatnya dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi secara maksimal. Sehingga, pertumbuhan ekonomi yang diciptakan sebagai hasil dari peningkatan dana alokasi umum sebagai modal dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Jeneponto mengalami peningkatan tapi tidak signifikan.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil pengujian data penelitian nilai koefisien sebesar -0,083 dengan taraf signifikansi $0,899 > 0,05$. Sehingga, dana alokasi khusus memberikan pengaruh negatif tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Hal tersebut memiliki maksud bahwa ketika dana alokasi khusus yang diperoleh Kabupaten Jeneponto meningkat maka peningkatan tersebut tidak mampu membuat perekonomian daerah turut mengalami peningkatan.

Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan teori yang dikemukakan oleh Solow-Swan bahwa modal merupakan satu dari beberapa faktor produksi yang dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi. Dana alokasi khusus yang dapat menjadi modal dalam melaksanakan pembangunan, ternyata tidak mampu meningkatkan perekonomian di Kabupaten Jeneponto disebabkan karena dana alokasi khusus memiliki kriteria penggunaan khusus dibandingkan dana lainnya. Dana alokasi khusus telah ditetapkan untuk dialokasikan pada pembiayaan pelaksanaan program pembangunan yang menjadi prioritas nasional. Sehingga, pembiayaan terhadap pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari dana alokasi khusus tidak mampu meningkatkan perekonomian di Kabupaten Jeneponto.

Berdasarkan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Kabupaten Jeneponto tahun 2020, menunjukkan bahwa penggunaan dana alokasi khusus digunakan untuk pembangunan fisik (reguler, penugasan dan afirmasi) dan pembangunan nonfisik. Pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik diarahkan pada pembiayaan bidang pendidikan, kesehatan dan keluarga berencana, air minum dan sanitasi, perumahan dan pemukiman, irigasi dan pertanian, kelautan dan perikanan dan bidang transportasi. Sedangkan, pelaksanaan kegiatan pembangunan nonfisik diarahkan pada pembiayaan BOP PAUD, BOP pendidikan kesejahteraan, BOP kesehatan dan keluarga berencana, tunjangan profesi guru, tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, dana untuk meningkatkan kapasitas koperasi dan usaha kecil menengah, dana untuk peningkatan pelayanan administrasi kependudukan serta dana untuk peningkatan pelayanan kepariwisataan.

Seluruh jenis kegiatan pembiayaan tersebut, pembiayaan pada tunjangan profesi guru yang memperoleh alokasi dana terbesar yaitu Rp. 79.950.220.000 atau sekitar 35 persen dari total dana alokasi khusus yang diperoleh Kabupaten Jeneponto. Kemudian disusul dengan pembiayaan BOP kesehatan dan keluarga berencana sebesar 30 persen serta pembiayaan pada bidang pendidikan sebesar 18 persen. Berdasarkan jenis kegiatan yang dibiayai oleh dana alokasi khusus tersebut secara umum merupakan jenis kegiatan yang sifatnya tidak dapat meningkatkan kapasitas produksi daerah yang membuat perekonomian Kabupaten Jeneponto meningkat.

Sebagaimana penelitian oleh Andri Widiyanto, Dkk (2016) yang melakukan penelitian di Kota Tegal, Andri Gustaf Eka Saputera dan Pandoyo (2020) di

Provinsi Jawa Tengah serta penelitian oleh Meylani M. Arina, Dkk (2019) yang melakukan penelitian di Kota Manado menemukan hasil penelitian yang serupa dengan hasil penelitian ini yaitu dana alokasi khusus berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, disisi lain hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Olvy Beatriks Talangamin, dkk (2018) yang menemukan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Tomohon.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pengangguran

Berdasarkan hasil pengujian data penelitian nilai koefisien 0,576 dengan taraf signifikansi $0,147 > 0,05$. Hal tersebut menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah memberikan pengaruh positif tidak signifikan terhadap pengangguran. Maknanya ialah ketika pendapatan asli daerah Kabupaten Jeneponto mengalami peningkatan dapat berdampak pada angka pengangguran yang tidak mengalami penurunan atau angka pengangguran mengalami peningkatan.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, sejak tahun 2016-2020 angka pengangguran di Kabupaten Jeneponto hanya menurun sebesar 0,50 persen. Artinya, dalam kurun 4 tahun selama proses pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Jeneponto hanya mampu menurunkan angka pengangguran kurang dari 1 persen. Hal ini mengisyaratkan bahwa belum ada keseriusan yang dimiliki oleh Kabupaten Jeneponto dalam menanggulangi masalah pengangguran. Apabila kita melihat data perolehan pendapatan asli daerah yang diperoleh Kabupaten Jeneponto pada tahun 2016-2020 ialah terjadi fluktuasi akan tetapi lebih didominasi dengan terjadinya peningkatan. Pada tahun 2020, pendapatan asli daerah Kabupaten Jeneponto meningkat cukup signifikan dari tahun sebelumnya. Namun, disisi lain angka pengangguran yang semestinya mengalami penurunan sebagai akibat dari meningkatnya pendapatan asli daerah namun yang terjadi ialah justru angka pengangguran mengalami peningkatan.

Pendapatan asli daerah dapat dijadikan sebagai modal dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Jeneponto. Peningkatan pada jumlah pendapatan asli daerah belum mampu memberikan dampak penurunan pada angka pengangguran di Kabupaten Jeneponto. Hal ini dapat terjadi karena penggunaan pendapatan asli daerah dalam pelaksanaan pembangunan tidak dialokasikan pada program yang dapat membuka lapangan kerja baru sehingga angka pengangguran tidak mengalami penurunan. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jeneponto tahun 2020, dari total belanja yang terealisasi sebesar Rp. 1.093.202.342.326 terdapat

sebesar 48 persen dialokasikan untuk belanja pegawai daerah dan 21 persen untuk belanja modal. Artinya, pada tahun 2020 Kabupaten Jeneponto menggunakan hampir setengah belanja daerah hanya untuk pembiayaan belanja pegawai.

Pengalokasian sebagian besar belanja daerah untuk belanja pegawai tidak hanya terjadi di tahun 2020 namun juga terjadi pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2019, realisasi belanja daerah sebesar Rp. 1.172.449.298.255 dan 44 persennya digunakan untuk belanja pegawai daerah dan 25 persen untuk belanja modal Kabupaten Jeneponto. Pada dasarnya, belanja pegawai digunakan untuk membayar gaji beserta tunjangan dari para pegawai daerah sehingga secara otomatis tidak dapat menurunkan angka pengangguran karena tidak menciptakan lapangan kerja baru. Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh sebagian besar dari hasil pemungutan. Sehingga sudah seharusnya pendapatan tersebut harus digunakan kembali untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat daerah. Penyusunan belanja daerah semestinya dilakukan secara bijak seperti sebagian besar belanja daerah dialokasikan pada belanja modal sebagai sarana dalam membuka kesempatan kerja baru bagi masyarakat sehingga angka pengangguran menjadi menurun.

Hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pengangguran sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yani Rizal, dkk (2021) yang melakukan penelitian tersebut di Provinsi Aceh. Namun, disisi lain tidak sejalan dengan penelitian Putu Eka Suwandika dan I Nyoman Mahendra Yasa (2015) yang menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran di Provinsi Bali.

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pengangguran

Berdasarkan hasil pengujian data penelitian yang memberikan nilai koefisien -1,347 dengan taraf signifikansi $0,007 < 0,05$. Sehingga, menyimpulkan bahwa dana alokasi umum memberikan yang negatif signifikan terhadap pengangguran. Artinya, apabila jumlah dana lokasi umum yang diterima oleh Kabupaten Jeneponto mengalami peningkatan maka akan menurunkan angka pengangguran di daerah ini secara signifikan.

Pada dasarnya, dana alokasi umum menjadi cara yang ditempuh oleh pemerintah pusat untuk membantu keuangan daerah dalam melaksanakan pembangunan. Kabupaten Jeneponto mampu mengelola dengan baik dana lokasi umum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas. Daerah ini memanfaatkan dana alokasi umum dalam melaksanakan pembangunan

untuk menurunkan angka pengangguran. Berdasarkan dokumen kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020, Kabupaten Jeneponto telah merumuskan berbagai strategi untuk dapat menurunkan angka pengangguran. Strategi tersebut diantaranya mendorong terjadinya peningkatan investasi yang dapat membuka lapangan kerja yang lebih luas dengan berfokus pada penurunan angka pengangguran. Selain itu, meningkatkan pelayanan dan penyediaan fasilitas ekonomi di pasar dan kepada para pelaku sektor informal untuk mendorong kegiatan perekonomian daerah sehingga dapat menciptakan lapangan kerja baru. Untuk mewujudkan strategi tersebut diperlukan modal yang memadai agar dapat terlaksana sesuai dengan tujuan.

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jeneponto tahun 2020, menunjukkan bahwa total realisasi pendapatan daerah sebanyak Rp. 1.256.069.109.580 dan jumlah dana alokasi umum sebanyak Rp. 616.181.442.000. Artinya, 49 persen dari total pendapatan daerah Kabupaten Jeneponto pada tahun 2020 berasal dari dana alokasi umum. Sehingga, sumber penerimaan yang memiliki peranan yang sangat penting dalam struktur pendapatan daerah Kabupaten Jeneponto ialah dana alokasi umum. Besarnya kontribusi dana alokasi umum terhadap pendapatan daerah Kabupaten Jeneponto telah membantu daerah dalam meningkatkan belanja daerah untuk melaksanakan pembangunan yang berimbas pada terjadinya penurunan angka pengangguran di daerah ini.

Selanjutnya, kegiatan belanja daerah telah menghasilkan tenaga kerja pada tahun 2020 sebesar 186.684 tenaga kerja dengan rincian 111.155 bekerja pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan atau sama dengan 60 persen dari total tenaga kerja. Selanjutnya, sektor pengolahan sebanyak 17.582 tenaga kerja atau sama dengan 9 persen dari total tenaga kerja. Terakhir, pada sektor jasa kemasyarakatan sebanyak 57.977 tenaga kerja atau sama dengan 31 persen dari total tenaga kerja Kabupaten Jeneponto tahun 2020. Sehingga, peningkatan jumlah dana alokasi umum yang diperoleh Kabupaten Jeneponto telah mampu menurunkan angka pengangguran dengan semakin banyaknya angkatan kerja yang telah bekerja.

Sebagaimana penelitian yang dilakukan Devi Indriani (2013) menemukan hasil penelitian yang serupa dengan hasil penelitian ini yaitu dana alokasi umum memberikan pengaruh yang negatif signifikan terhadap pengangguran di Indonesia. Akan tetapi, penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian (Manulusi et al., 2021), Karnila Ali dan Nur Wahyu Ningsih (2019) yang

menyatakan hasil dana alokasi umum tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pengangguran.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Pengangguran

Berdasarkan pengujian data penelitian yang menghasilkan nilai koefisien sebesar -0,022 dengan taraf signifikansi $0,934 > 0,05$. Sehingga, menyimpulkan dana alokasi khusus berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap pengangguran. Artinya, ketika terjadi peningkatan pada dana alokasi khusus di Kabupaten Jeneponto maka dapat berdampak pada penurunan angka pengangguran walaupun penurunannya tidak signifikan.

Dana alokasi khusus adalah dana yang diperoleh Kabupaten Jeneponto untuk membiayai pelaksanaan kegiatan pembangunan yang telah menjadi prioritas nasional. Apabila terjadi peningkatan pada jumlah transfer dana alokasi khusus yang diperoleh maka akan menambah modal keuangan Kabupaten Jeneponto untuk menyelenggarakan pembangunan yang akan berdampak pada penurunan angka pengangguran.

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jeneponto tahun 2020 menunjukkan total realisasi pendapatan daerah sebesar Rp. 1.256.069.109.580 dengan jumlah pendapatan dana alokasi khusus Rp. 228.511.374.000. Dengan kata lain, 18 persen dari total keseluruhan pendapatan daerah Kabupaten Jeneponto berasal dari dana alokasi khusus. Artinya, sebesar 18 persen pendapatan daerah meningkat sebagai akibat adanya dana alokasi khusus yang diperoleh. Penggunaan pendapatan sebesar 18 persen tersebut telah ditetapkan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan prioritas nasional.

Berdasarkan Catatan Atas Laporan Keuangan tahun 2020, Penggunaan dana alokasi khusus di Kabupaten Jeneponto telah ditetapkan untuk membiayai beberapa program pembangunan seperti pada bidang pendidikan, kesehatan, air minum dan sanitasi, irigasi dan pertanian, kelautan dan perikanan, transportasi, peningkatan kapasitas koperasi dan usaha kecil menengah serta pada pelayanan kepariwisataan. Pembiayaan terhadap program-program pembangunan tersebut mampu menurunkan angka pengangguran di Kabupaten Jeneponto secara tidak signifikan. Artinya, program-program pembangunan tersebut mampu membuka lapangan kerja baru sehingga menyebabkan angka pengangguran menurun secara tidak signifikan.

Menurunnya angka pengangguran sebagai akibat pembiayaan program-program pembangunan pada bidang pendidikan, kesehatan, air minum dan sanitasi, irigasi dan pertanian, kelautan dan perikanan, transportasi, peningkatan

kapasitas koperasi dan usaha kecil menengah serta pada pelayanan kepariwisataan yang berasal dari dana alokasi khusus dapat terjadi karena sebagian besar tenaga kerja di daerah ini bekerja pada bidang-bidang tersebut. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Jeneponto, menunjukkan bahwa total tenaga kerja pada tahun 2020 sebanyak 186.684 tenaga kerja dan badan pusat statistik mengklasifikasi bidang usaha yang menyerap tenaga kerja di Kabupaten Jeneponto menjadi tiga bidang.

Bidang pertama ialah pertanian, kehutanan dan perikanan sebanyak 111.155 tenaga kerja atau sama dengan 60 persen dari total tenaga kerja. Peranan dana alokasi khusus pada bidang ini sehingga mampu membuat angka pengangguran menurun secara tidak signifikan ialah melalui pembangunan dan perbaikan irigasi serta jalan pertanian yang akan membuat produktifitas dari sektor pertanian menjadi meningkat. Ketika produktifitas pertanian telah meningkat, pada umumnya orang-orang cenderung mempekerjakan orang baru untuk mengolah lahannya sehingga akan menghadirkan lapangan kerja baru walaupun dalam jumlah yang sedikit.

Bidang kedua ialah bidang jasa kemasyarakatan sebanyak 57.977 tenaga kerja atau sama dengan 31 persen dari total tenaga kerja. Peranan dana alokasi khusus pada bidang ini sehingga mampu membuat angka pengangguran menurun secara tidak signifikan ialah melalui pembiayaan pada bidang pendidikan, kesehatan, pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan kepariwisataan yang dapat meningkatkan jumlah tenaga kerja pada bidang tersebut. Bertambahnya jumlah tenaga kerja bidang jasa kemasyarakatan seperti pendidikan, kesehatan, pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan kepariwisataan sebagai akibat adanya sumber pembiayaan tambahan dari dana alokasi khusus yang dapat digunakan untuk membayar tenaga kerja. Kondisinya akan berbeda apabila tidak ada dana yang akan digunakan untuk membayar tenaga kerja yang akan secara otomatis membuat tenaga kerja berhenti bekerja atau tidak memilih bekerja pada bidang tersebut karena tidak adanya gaji yang akan diperoleh dari hasil kerjanya.

Terakhir ialah industri pengolahan sebanyak 17.552 tenaga kerja atau sama dengan 9 persen dari total tenaga kerja. Peranan dana alokasi khusus pada bidang ini sehingga mampu membuat angka pengangguran menurun secara tidak signifikan ialah melalui pembangunan atau peningkatan infrastruktur jalan untuk mempermudah mobilitas industri pengolahan. Salah satu pertimbangan yang digunakan industri dalam menambah jumlah tenaga kerja ialah berdasarkan banyaknya biaya produksi yang digunakan. Semakin tinggi biaya produksi maka akan semakin mengurangi jumlah tenaga kerja agar pengeluaran

dapat diminimalisir begitupun sebaliknya. Infrastruktur jalan menjadi salah satu faktor yang dapat menambah atau mengurangi biaya produksi dari sebuah industri. Ketika infrastruktur jalan bagus maka akan memperlancar mobilitas dari sebuah industri sehingga akan mengurangi biaya produksi yang dapat berdampak pada kemampuan industri dalam menyerap tenaga kerja baru. Sehingga, akan berdampak pada menurunnya angka pengangguran walaupun tidak signifikan.

Penelitian oleh Riski Prasetyo Putro (2016) yang dilakukan di wilayah Sumatera dan penelitian oleh Karnila Ali dan Nur Wahyu Ningsih (2021) di Kota Metro mendukung hasil penelitian ini. Akan tetapi, penelitian Nanda Jaka Prasetya dan Rifaldi (2017) tidak mendukung hasil penelitian ini karena menunjukkan bahwa dana alokasi khusus memberikan pengaruh positif signifikan terhadap pengangguran di Provinsi Jawa Tengah.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengangguran

Berdasarkan hasil pengujian data penelitian yang menunjukkan bahwa nilai koefisien sebesar 0,197 dengan taraf signifikansi sebesar $0,246 > 0,05$. Sehingga, menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pengangguran. Artinya, angka pengangguran di Kabupaten Jeneponto tidak menurun meskipun terjadi pertumbuhan ekonomi di daerah ini. Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan Hukum Okun yang mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan pengangguran memiliki hubungan yang negatif yaitu ketika terjadi pertumbuhan ekonomi maka akan membuat angka pengangguran menurun.

Pertumbuhan ekonomi sering dijadikan sebagai ukuran dalam melihat kualitas perekonomian di suatu daerah. Daerah dapat dikatakan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang baik apabila menciptakan pertumbuhan inklusif yaitu yang dapat memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Kabupaten Jeneponto menjadi salah satu daerah yang menciptakan pertumbuhan ekonomi namun tidak menghasilkan pertumbuhan inklusif yaitu pertumbuhan berkualitas yang dapat membuka lapangan kerja baru sehingga angka pengangguran menjadi berkurang.

Kabupaten Jeneponto merupakan salah satu daerah yang pernah ditetapkan sebagai daerah 3T (Terdepan, Terpencil dan Tertinggal) pada tahun 2015 oleh Presiden Republik Indonesia. Penetapan Kabupaten Jeneponto sebagai daerah 3T disebabkan oleh beberapa hal seperti kondisi perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, kemampuan keuangan daerah dan lain lain yang kurang berkembang dari daerah lain di seluruh wilayah Indonesia.

Akibatnya, daerah ini membutuhkan usaha yang lebih keras dibandingkan daerah lain dalam hal pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelaksanaan pembangunan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi sehingga mampu menurunkan angka pengangguran ternyata tidak berjalan dengan mulus di daerah ini. Pertumbuhan ekonomi yang tercipta sebagai hasil dari pelaksanaan pembangunan tidak mampu membuat angka pengangguran menjadi menurun.

Angka pengangguran yang tidak berhasil diturunkan meskipun telah terjadi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jeneponto dapat disebabkan oleh beberapa hal salah satunya ialah karena ketidakmampuan pencari kerja dalam memenuhi kualifikasi yang ditetapkan oleh penyedia lapangan kerja. Pengangguran jenis ini dikenal sebagai pengangguran friksional. Keterbatasan lapangan kerja yang tersedia ditambah dengan rendahnya kualitas sumber daya manusia sehingga menjadi faktor penyebab terciptanya pengangguran friksional di Kabupaten Jeneponto.

Pada tahun 2020, Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan bahwa Kabupaten Jeneponto menjadi daerah yang memperoleh nilai IPM terendah di Provinsi Sulawesi Selatan yang hanya menyentuh angka 64,26 persen. Rendahnya capaian indeks pembangunan manusia di Kabupaten Jeneponto telah membuktikan bahwa kualitas sumber daya manusia di daerah ini masih minim sehingga menyebabkan angka pengangguran tetap mengalami peningkatan meskipun telah terjadi pertumbuhan ekonomi.

Disisi lain, Badan Pusat Statistik mencatat pada tahun 2020 sektor pertanian, kehutanan dan perikanan memberikan kontribusi tertinggi dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku Kabupaten Jeneponto yaitu mencapai angka 44,23 persen. Pertanian dan kehutanan merupakan sektor yang tingkat produksinya sangat bergantung pada perubahan iklim dan ketersediaan air. Iklim sangat memengaruhi hasil produksi pertanian. Produksi akan tetap mengalami peningkatan apabila didukung oleh kondisi iklim yang mendukung dan ketersediaan air yang mencukupi meskipun jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk melakukan kegiatan produksi tidak bertambah. Selanjutnya, produksi perikanan sangat bergantung dengan kondisi cuaca sedangkan jumlah tenaga kerja tidak terlalu memberikan kontribusi pada jumlah produksi sektor tersebut. Sehingga, pertumbuhan ekonomi yang terjadi tidak dapat menurunkan angka pengangguran karena produksi pada salah satu sektor dengan tingkat kontribusi tertinggi dalam PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Jeneponto tidak bergantung pada jumlah tenaga kerja.

Pertumbuhan ekonomi yang terus terjadi sebagai akibat meningkatnya jumlah produksi barang dan jasa tidak secara otomatis mampu mengurangi angka pengangguran. Hal tersebut disebabkan karena peningkatan kapasitas produksi pada sektor perekonomian daerah tidak menjamin terbukanya lapangan kerja baru. Misalnya, pada sektor yang menjadi penyumbang terbesar perekonomian daerah pertanian, kehutanan dan perikanan yang walaupun terjadi peningkatan pada kegiatan produksinya tidak secara otomatis akan membuka lapangan kerja baru terlebih apabila telah didukung dengan teknologi dalam melakukan kegiatan produksi yang akan membuat peranan dari tenaga kerja menjadi tergantikan. Sehingga, menyebabkan angka pengangguran menjadi meningkat.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pengangguran melalui Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil pengujian data penelitian pengaruh pendapatan asli daerah terhadap pengangguran dengan menggunakan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervening menunjukkan hasil pengujian pengaruh tidak langsung $-0,136 <$ pengaruh langsung $0,576$. Sehingga, pendapatan asli daerah secara tidak langsung berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pengangguran melalui pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervening dapat memberikan dampak pada pengangguran di Kabupaten Jeneponto. Hukum Okun menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang negatif terhadap pengangguran. Hal ini memiliki maksud bahwa ketika terjadi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jeneponto maka akan menyebabkan angka pengangguran menurun di daerah ini. Pendapatan asli daerah yang dijadikan sebagai modal dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Jeneponto dapat memengaruhi kondisi pengangguran melalui terjadinya pertumbuhan ekonomi. Ketika Kabupaten Jeneponto berhasil meningkatkan perolehan pendapatan asli daerah dapat membuat pendapatan daerah menjadi meningkat sehingga modal yang digunakan dalam melaksanakan pembangunan akan semakin besar jumlahnya. Apabila suatu daerah telah memiliki modal dalam jumlah yang besar maka pelaksanaan pembangunan di daerah akan berjalan dengan lancar. Kelancaran dari pelaksanaan pembangunan akan mempermudah tercapainya tujuan pembangunan yaitu menciptakan pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi yang terjadi akan memberikan dampak pada penurunan angka pengangguran. Pertumbuhan ekonomi membuat barang dan jasa yang diproduksi daerah semakin meningkat sehingga sektor-sektor

ekonomi daerah dapat menghasilkan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Peningkatan produksi barang dan jasa dapat memberikan lapangan kerja baru karena semakin banyak produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan maka akan semakin memerlukan tenaga kerja untuk menghasilkan produk dalam jumlah yang besar. Sehingga, pelaku ekonomi baik itu perusahaan, badan usaha atau individu akan memutuskan untuk merekrut karyawan baru yang akan berdampak pada penurunan angka pengangguran.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah secara tidak langsung memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pengangguran melalui pertumbuhan ekonomi. Artinya, pendapatan asli daerah yang meningkat akan membuat pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat yang dapat berdampak pada penurunan angka pengangguran namun secara tidak signifikan atau penurunannya tidak begitu berarti. Hal tersebut dapat terjadi karena berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jeneponto tahun 2020, kontribusi pendapatan asli daerah hanya sebesar Rp. 109.189.131.000 dari total keseluruhan pendapatan yang diperoleh yaitu Rp. 1.256.069.109.580 atau sama dengan 8,7 persen dari keseluruhan pendapatan daerah.

Rendahnya kontribusi yang diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah memberikan hasil yang tidak maksimal dalam proses pelaksanaan pembangunan yaitu menurunkan angka pengangguran. Selain itu, alokasi belanja daerah yang masih belum maksimal dalam mendorong terciptanya lapangan kerja baru di daerah ini. Pada tahun 2020, alokasi belanja daerah masih didominasi dengan belanja pegawai sebesar 48 persen dari total belanja daerah. Hal ini dapat berdampak pada kinerja pelaksanaan pembangunan untuk menurunkan angka pengangguran karena belum didukung dengan anggaran dalam jumlah yang besar. Sehingga, penurunan angka pengangguran menjadi kurang maksimal. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Surya Dewi Rustariyani, Dkk (2019) yang melakukan penelitian di Provinsi Bali.

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pengangguran melalui Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil pengujian data penelitian pengaruh dana alokasi umum terhadap pengangguran dengan menggunakan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervening menunjukkan hasil pengujian pengaruh tidak langsung $0,082 >$ pengaruh langsung $-1,347$. Sehingga, dana alokasi umum secara

tidak langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran melalui pertumbuhan ekonomi.

Dana alokasi umum memiliki peranan penting dalam pendapatan daerah Kabupaten Jeneponto karena memberikan kontribusi yang sangat besar. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jeneponto tahun 2020, total realisasi pendapatan daerah Kabupaten Jeneponto sebesar Rp. 1.256.069.109.580 dan perolehan dana alokasi umum mencapai Rp. 616.181.442.000. Artinya, 49 persen dari total pendapatan daerah Kabupaten Jeneponto bersumber dari dana alokasi umum.

Besarnya kontribusi yang diberikan dana alokasi umum terhadap pendapatan Kabupaten Jeneponto membuat peranannya sangat penting dalam melancarkan pelaksanaan pembangunan di daerah ini. Kelancaran dalam pelaksanaan pembangunan akan mempermudah tercapainya tujuan pembangunan salah satunya yaitu mencapai pertumbuhan ekonomi. Jadi, peningkatan yang terjadi pada perolehan dana alokasi umum akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang meningkat. Selanjutnya pertumbuhan ekonomi akan memberikan dampak yang lebih luas dalam kehidupan masyarakat salah satunya ialah dapat mengatasi pengangguran.

Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh tidak langsung yang diberikan dana alokasi umum terhadap pengangguran melalui pertumbuhan ekonomi ialah pengaruh positif. Artinya secara tidak langsung peningkatan dana alokasi umum tidak dapat menurunkan angka pengangguran. Ketika terjadi pertumbuhan ekonomi yang tercipta sebagai hasil dari peningkatan dana alokasi umum tidak mampu menciptakan lapangan kerja baru sehingga angka pengangguran yang diharapkan dapat menurun namun yang terjadi ialah sebaliknya.

Salah satu penyebab angka pengangguran tidak menurun meskipun dana alokasi umum mengalami peningkatan dan menghasilkan pertumbuhan ekonomi karena pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan bukanlah pertumbuhan bersifat inklusif yaitu dapat memberikan manfaat lebih luas terhadap masyarakat. Dalam hal ini, pertumbuhan ekonomi yang terjadi tidak mampu membuka lapangan kerja yang luas sehingga pengangguran tidak mengalami penurunan. Hal ini dapat terjadi dikarenakan masih ditemuinya masalah dalam pengalokasian belanja daerah Kabupaten Jeneponto.

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2020 menunjukkan bahwa 48 persen belanja daerah dialokasikan untuk keperluan belanja pegawai yang terdiri dari pembayaran gaji dan tunjangan pegawai serta biaya operasional lainnya. Jenis belanja tersebut

pada dasarnya tergolong kedalam jenis belanja yang kurang produktif. Perekonomian dapat saja meningkat sebagai hasil dari bentuk konsumsi yang dilakukan namun tidak secara otomatis mampu membuka lapangan kerja karena peningkatan konsumsi hanya sebatas meningkatkan laba dalam jumlah yang kecil. Sehingga, belum mampu membuka lapangan kerja baru yang berdampak pada penurunan angka pengangguran di Kabupaten Jeneponto. Dana alokasi umum yang memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran melalui pertumbuhan ekonomi sejalan dengan hasil penelitian Iskandar, dkk (2021) yang melakukan penelitian tersebut di Provinsi Aceh.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Pengangguran melalui Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil pengujian data penelitian pengaruh dana alokasi khusus terhadap pengangguran dengan menggunakan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervening menunjukkan hasil pengujian pengaruh tidak langsung $-0,016 >$ pengaruh langsung $-0,022$. Sehingga, dana alokasi khusus secara tidak langsung berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran melalui pertumbuhan ekonomi.

Dana alokasi khusus menjadi sumber pendapatan Kabupaten Jeneponto yang penggunaannya telah ditetapkan untuk mendanai pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas nasional. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jeneponto tahun 2020, kontribusi yang diberikan dana alokasi khusus pada pendapatan Kabupaten Jeneponto sebesar 18 persen. Artinya, 18 persen dari total pendapatan daerah bersumber dari dana alokasi khusus. Berdasarkan Catatan Atas Laporan Keuangan tahun 2020 pendapatan sebesar 18 persen tersebut kemudian dialokasikan untuk membiayai program pembangunan seperti pada bidang pendidikan, kesehatan, air minum dan sanitasi, irigasi dan pertanian, kelautan dan perikanan, transportasi, peningkatan kapasitas koperasi dan usaha kecil menengah serta pada pelayanan kepariwisataan.

Ketika pembiayaan terhadap program-program pembangunan tersebut mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi maka dapat berdampak pada penurunan angka pengangguran di Kabupaten Jeneponto secara signifikan. Hal ini dikarenakan sebagian besar tenaga kerja di daerah ini pada tahun 2020 bekerja pada sektor yang bidangnya menjadi bagian dari pembiayaan dana alokasi khusus. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Jeneponto, menunjukkan bahwa total tenaga kerja pada tahun 2020 sebanyak 186.684 tenaga kerja. Tenaga kerja dengan jumlah 186.684 tersebut bekerja pada

bidang pertanian, kehutanan dan perikanan sebanyak 111.155 atau sama dengan 60 persen dari total tenaga kerja. Bidang ini menjadi salah satu bidang yang menjadi bagian dari pembiayaan dana alokasi khusus yang diarahkan pada pembangunan dan perbaikan irigasi serta jalan pertanian yang menjadi penunjang kelancaran sektor tersebut.

Selanjutnya, sebanyak 57.977 tenaga kerja atau sama dengan 31 persen dari total tenaga kerja bekerja pada bidang jasa kemasyarakatan. Bidang ini pula menjadi bagian dari pembiayaan dana alokasi khusus yang diarahkan pada pembiayaan di bidang pendidikan, kesehatan, pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan kepariwisataan yang dapat meningkatkan jumlah tenaga kerja pada bidang tersebut. Bertambahnya jumlah tenaga kerja bidang jasa kemasyarakatan seperti pendidikan, kesehatan, pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan kepariwisataan sebagai akibat adanya sumber pembiayaan tambahan dari dana alokasi khusus yang dapat digunakan untuk membayar tenaga kerja. Kondisinya akan berbeda apabila tidak ada dana yang akan digunakan untuk membayar tenaga kerja yang secara otomatis membuat tenaga kerja berhenti bekerja atau tidak memilih bekerja pada bidang tersebut karena tidak adanya gaji yang akan diperoleh dari hasil kerjanya.

Terakhir, sebanyak 17.552 tenaga kerja atau sama dengan 9 persen dari total tenaga kerja bekerja pada bidang industri pengolahan. Bidang ini pula menjadi bagian dari pembiayaan dana alokasi khusus yang diarahkan pada pembiayaan pembangunan atau peningkatan infrastruktur jalan untuk mempermudah mobilitas industri pengolahan. Salah satu pertimbangan yang digunakan industri dalam menambah jumlah tenaga kerja ialah berdasarkan banyaknya biaya produksi yang digunakan. Semakin tinggi biaya produksi maka akan semakin mengurangi jumlah tenaga kerja agar pengeluaran dapat diminimalisir begitupun sebaliknya. Infrastruktur jalan menjadi salah satu faktor yang dapat menambah atau mengurangi biaya produksi dari sebuah industri. Ketika infrastruktur jalan bagus maka akan memperlancar mobilitas dari sebuah industri sehingga akan mengurangi biaya produksi. Apabila biaya produksi berkurang maka dapat meningkatkan kemampuan industri dalam menyerap tenaga kerja baru sehingga angka pengangguran menjadi menurun. Sebagaimana dijelaskan dalam Islam mengenai Prinsip dasar Pembangunan ekonomi diarahkan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dengan Konsep *Falah*. Konsep *Falah* menjelaskan Kebahagiaan baik di Dunia dan di Akhirat yaitu dengan menjalankan ajaran agaman islam secara sempurna atau *Khaffah*. Sehingga pembangunan ekonomi dapat menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan Kepentingan masyarakat yang selaras sesuai

dengan ajaran agaman islam dengan Pendekatan yang disebut *Maqashid Syariah*. Dimana pembangunan ekonomi dalam islam selalu diarahkan pada penciptaan kebaikan yang mendatangkan faedah atau manfaat, apabila pendekatan ini dijalankan dengan baik, maka akan terjalin maslahat bukan hanya bagi umat muslim tapi juga masyarakat secara umum (Amalia, 2017).

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketercapaian indikator dalam MGDs di Kabupaten Jeneponto belum optimal sebagaimana juga menjadi tuntutan dalam penerapan nilai-nilai Islam. Keberhasilan sebuah pembangunan diukur dari pemerataan pembangunan yang tercermin pada kesejahteraan masyarakat. Aspek ini juga menjadi esensi dalam ajaran Islam yang menghendaki adanya keadilan ekonomi bagi semua ummat melalui pemerataan hasil pembangunan. Perumusan kebijakan dan strategi pembangunan belum begitu maksimal di daerah ini sehingga berdampak pada capaian *Sustainable Development Goals* (MDGs) yang masih rendah. Pelaksanaan SDGs di Kabupaten Jeneponto telah keluar dari jalur nilai-nilai keislaman, sebagaimana dalam islam dijelaskan bahwa pembangunan ekonomi bertujuan untuk mencapai suatu kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat yang biasa disebut konsep *Falah*. Tanpa Keadilan dan adil terhadap manusia dan alam, *Falah* tidak akan pernah dapat tercapai, khususnya dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

REFERENCES

- Abdurrahman, L.T., Saifullah, U., Darussalam, I., Arkham, S.A. (2022). SDGs and Islamic Studies: Fiqih Muamalat, Sustainable Development, and Maqashid Asy-Syari'ah. *Az Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Vol. 14, No. 2.
- Arianto, Z., & Wirasenjaya, A. M. (2019). Upaya pemerintahan joko widodo dalam mendorong implementasi Sustainable Development Goals. *Repository UMY*, 1-17.
- Bato, A. R., & Khatimah, H. (2021). Pengaruh Jumlah Penduduk dan Pengangguran terhadap Kemiskinan dan Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan The Effect of Population and Unemployment on Poverty and Economic Growth in South Sulawesi Province. 1, 132-147.

BPS (2011-2021) Badan Pusat Statistik Kabupaten Jeneponto

Caballero, P. (2019). The SDGs: Changing How Development is Understood. *Global Policy*, 10 (January), 138–140. <https://doi.org/10.1111/1758-5899.12629>

Firdausy, C. M. (2017). *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Ali Daerah dalam Pembangunan Nasional*. (E-book). Jakarta: Yayasan Putra Obor Indonesia.

Frisdiantara, C. & Mukhlis, I. (2018). *Ekonomi Pembangunan Sebuah Kajian Teoritis dan Empiris*. (E-book). Yogyakarta: Deepublish

Hasyim, A. I. (2017). *Ekonomi Makro*. (E-book). Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama

Jannah, N. S., & Bawono, A. D. B. (2021). Pengaruh Belanja Bantuan Sosial, Belanja Modal, DAU dan DAK Terhadap Pencapaian SDGS di Bidang Ekonomi (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Se-Indonesia Tahun 2018-2019). *Seminar Nasional and Call For Papers*, 1–14.

Kusumawati, L., & Wiksuana, I. G. B. (2018). Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 7(5), 2592. <https://doi.org/10.24843/ejmunud.2018.v07.i05.p12>

Mafrudlo, A. M., Nurrohman. (2022). Contextualization And Synergy Of The Concept Of Justice In Islamic Economic Development. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*. Vol. 5. No. 2.

Manulusi, M. R., Sinring, B., & Hasbi, A. M. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan. *Paradoks: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 4(3), 533–541. <http://jurnal.fe.umi.ac.id/index.php/PARADOKS/article/view/743>

Mokorowu, L. A., Rotinsulu, D. C., & Engka, D. S. M. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 21(04), 81–94. <https://doi.org/10.35794/jpekd.23451.20.01.2019>

Nur Alim Mubin AM. (2021). SDG's dalam Pembangunan Ekonomi Pasca Pandemi. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(8), 1330–1343.

<https://doi.org/10.36418/jiss.v2i8.387>

- Patiung, M. (2019). Analisis Permasalahan, Isu Strategis Dan Kebijakan Pembangunan Sdgs Kabupaten Mojokerto. *Jurnal Ilmiah Sosio Agribis*, 19(1), 33-52. <https://doi.org/10.30742/jisa.v19i1.686>
- Rahma, N. G., & Fernandes, J. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Dan Kota di Provinsi Sumatera Barat. *Academic Confrence Of Accounting*, 1, 344-356. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/14511/14084>
- Rizal, Y., Iskandar, & Ritonga, D. W. (2021). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran di Provinsi Aceh (pp. 56-67).
- Shaaibith, S. J., Daly, S. S., & Neama, M. M. (2020). Test of economic growth and unemployment using vector auto regression in Iraq. *Opcion Ano*, 36(27), 762-778.
- Smith, M. S., Cook, C., Sokona, Y., Elmqvist, T., Fukushi, K., Broadgate, W., & Jarzebski, M. P. (2018). Advancing sustainability science for the SDGs. *Sustainability Science*, 13(6), 1483-1487. <https://doi.org/10.1007/s11625-018-0645-3>
- Sofianto, A. (2019). Integrasi Target Dan Indikator Sustainable Development Goals Ke Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Di Jawa Tengah. *Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah*, 17(1), 25-41. <https://doi.org/10.36762/litbangjateng.v17i1.769>
- Sukirno, S. (2016). *Makroekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers
- Spriyanto, A. dkk. (2017). *Mencipta Inovasi, Inovasi untuk Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan*. (E-book). Jakarta: PT. Temprint.
- Zainur. (2021). Islamic Finance and Economic Development: The Impact of the Islamic Finance Sector on Indonesia's Economic Development. *Journal of Sharia Economics*. Vol 3(2).